

Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 Regional II

ASEP RAHMAT SUWANDHA
Koordinator Wilayah VI KPK
Bandung, 10 Maret 2020



Tugas KPK

(UU NO. 30 TAHUN 2002)



Koordinasi



Supervisi



Penindakan



Pencegahan



Monitoring

TUGAS DAN WEWENANG KPK (UU NO. 19 TAHUN 2019)



TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019)

TUGAS

Pasal 6 a

Tindakan-tindakan pencegahan
sehingga tidak terjadi Tindak Pidana
Korupsi



Pencegahan

Pasal 6 b

Koordinasi dengan instansi yang
berwenang melaksanakan
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan instansi yang bertugas
melaksanakan pelayanan publik



Koordinasi

Pasal 6 c

Monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintah negara



Monitor

Pasal 6 d

Supervisi terhadap instansi yang
berwenang melaksanakan
pemberantasan tindak pidana
korupsi



Supervisi

Pasal 6 e

Penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap Tindak Pidana
Korupsi



Penindakan

Pasal 6 f

Tindakan untuk melaksanakan
penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap

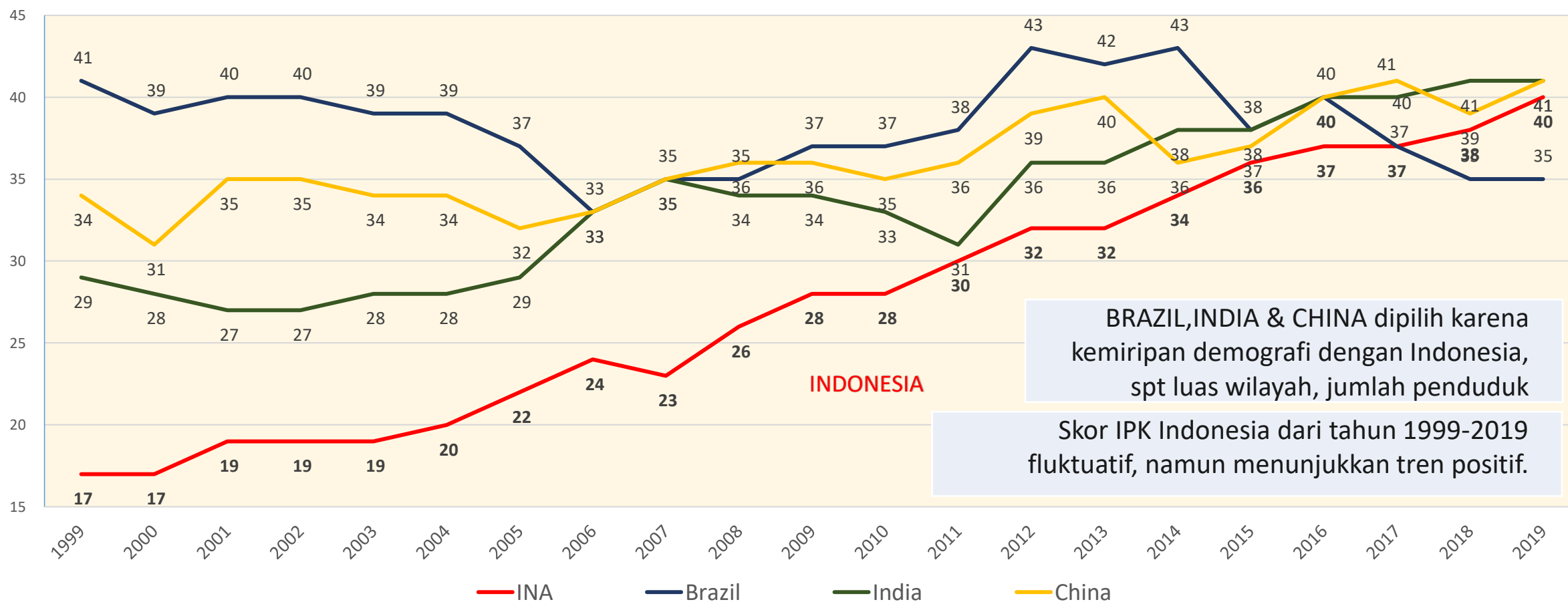


Eksekusi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PERBANDINGAN DENGAN BRAZIL, INDIA DAN CHINA

CPI Trends (BRICS selected Countries)



Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi **tujuh jenis** besar.



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2 , Ps. 3
(penyalahgunaan
wewenang)



2

SUAP-MENYUAP

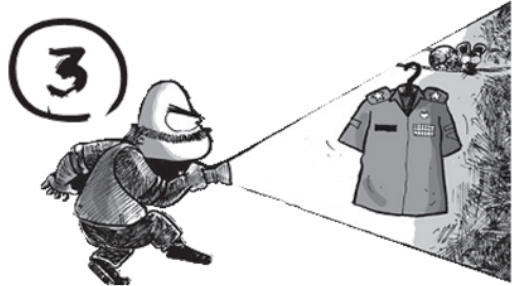
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps. 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i



6



3

PENGGELOPAN DALAM JABATAN

Pasal 8; 9; 10 a,b,c



4

PEMERASAN

Pasal 12 huruf e,f,g



TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI

- 1.Merintang proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor

7

GRATIFIKASI

Pasal 12B jo Pasal 12C



5

PERBUATAN CURANG

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h



Jabatan Tersangka Korupsi

2004 - 2019

Sumber: Data Penindakan KPK 2019

DPR/DPRD
257

Es.I/II/III
225

Walkot/
Bupati &
Wakilnya
119

Hakim
22

Pengacara
12

Jaksa
10

Korporasi
6

Swasta
297

Lainnya
142

Menteri/
Kepala K/L
28

Gubernur
21

Komisioner
7

Dubes
4

Polisi
2



JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2019

Sumber: Data Penindakan KPK, 2019



66%

PENYUAPAN
683 Perkara



20%

**PENGADAAN
BARANG & JASA**
206 Perkara



5%

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN 48 Perkara

4%

TPPU 36 Perkara

2%

PUNGUTAN/PEMERASAN 26 Perkara

2%

PERIZINAN 23 Perkara

1%

MERINTANGI PROSES KPK 10 Perkara



Terjadi Kasus KORUPSI 2004 - 2019

yang ditangani KPK



Sumber: Data Penindakan KPK, 2019

MALUKU
6 KASUS

NTB
12 KASUS

NTT
5 KASUS

PAPUA
22 KASUS

KALBAR
10 KASUS

KALTIM
22 KASUS

SULUT
10 KASUS

SULSEL
5 KASUS

SULTENG
5 KASUS

SULTRA
8 KASUS

DKI Jakarta
61 KASUS

BANTEN
24 KASUS

JABAR
101 KASUS

JATENG
49 KASUS

JATIM
85 KASUS

BALI
5 KASUS

KALSEL
10 KASUS

KALTENG
5 KASUS

NAD
14 KASUS

SUMUT
64 KASUS

SUMSEL
22 KASUS

SUMBAR
3 KASUS

JAMBI
12 KASUS

RIAU & KEP
51 KASUS

BENGKULU
22 KASUS

LAMPUNG
30 KASUS

MACAM KORUPSI

(Berdasarkan Motif Perbuatan)

K
O
R
U
P
S
I

- Corruption by **G**reed

Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi

- Corruption by **O**pportunities

Terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi

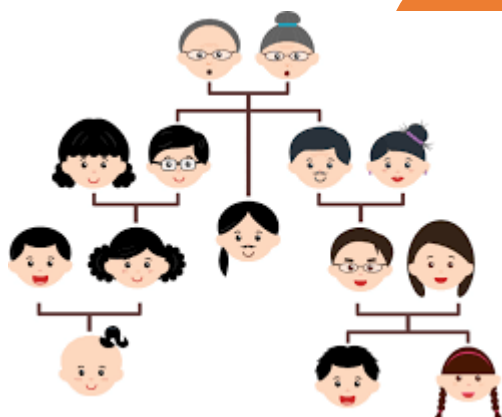
- Corruption by **N**eed

Berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.

- Corruption by **E**xposures

Berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah

MODUS KORUPSI SAAT INI



Melakukan Korupsi Bersama

- Suami - Istri
- Ayah/ Ibu – Anak
- Kolaborasi dg kerabat lain (Adik/ Kakak, Ipar, Mertua/ menantu, dst)



Melibatkan Keluarga sbg Sarana Pencucian Uang

- Rekening Bank/ Sekuritas
- Polis Asuransi
- Investasi/ Aset



TITIK RAWAN KORUPSI di PEMDA



1. Perencanaan APBD:

- Pembagian dan pengaturan “jatah proyek” APBD dan ljon proyek
- Meminta/menerima hadiah/ sesuatu pada proses perencanaan APBD

2. Penganggaran APBD:

- Pembahasan dan pengesahan RAPBD → “Uang Ketok”
- Dana aspirasi
- Pokir yang tidak sah

3. Pelaksanaan APBD:
PBJ → *mark-up*,
penurunan spek/kualitas, dan
pemotongan oleh bendahara

4. Perizinan

5. Pembahasan & Pengesahan Regulasi

6. Pengelolaan pendapatan daerah

7. Rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi Kepegawaian

8. Pelayanan publik

9. Proses penegakan hukum

Kesimpulan: Hulu dari berbagai kasus-kasus korupsi (mayor) di Pemda adalah mahalanya biaya politik (eksekutif dan legislatif)



STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

Strategi jangka pendek

strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Strategi jangka menengah

strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK - Perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara

Strategi jangka panjang dan berkelanjutan

diharapkan mampu mengubah budaya anti-korupsi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi → budaya produktif & inovatif

STRANAS PK

**PERPRES
55/2012**

**PERATURAN
PRESIDEN
NOMOR 54
TAHUN 2018**

**TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI**

koordinasi,
sinkronisasi, evaluasi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, **pemerintah daerah** dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia.

FOKUS STRANAS PK:

TERFOKUS

TERUKUR

BERDAMPAK



PERIJINAN & TATA NIAGA



KEUANGAN NEGARA



**PENEGAKAN HUKUM &
REFORMASI BIROKRASI**

Kegiatan harian,
fasilitasi, monitoring,
output dan outcome
delivery

**Presiden Republik Indon
esia**

Tim Nasional



Koordinator Tim Nasional

Top eselon dari
5 Kementerian Lembaga

Sekretariat Nasional

Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L,
Tim Administrasi

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

3 FOKUS

Perizinan dan Tata Niaga

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- 2 Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Keuangan Negara

- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- 11 Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020

- 3 -

h. optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non-pajak;

i. penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi;

j. implementasi *grand design* strategi pengawasan keuangan desa; dan

k. perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

KEEMPAT : Uraian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah melaporkan realisasi capaian target setiap triwulan.

KEENAM : Tim melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya.

KETUPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2018

KETUA KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI DALAM
NEGERI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

KEPALA STAF KEPRESIDENAN

RAHARDJO

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

TJAHJO KUMOLO

SYAIFUDDIN

MOELDOKO



DATA KEPATUHAN LHKPN PER 9 MARET 2020

NO	PEM PROV	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	KEPATUHAN
1.	ACEH	595	594	1	99.83%
2.	SUMATERA UTARA	885	739	146	83.50%
3.	SUMATERA BARAT	529	523	6	98.87%
4.	KEP. BANGKA BELITUNG	1.337	1.337	0	100.00%
5.	BENGKULU	432	199	233	46.06%
6.	RIAU	46	17	29	36.96%
7.	KEPULAUAN RIAU	1.218	1.201	17	98.60%
8.	JAMBI	523	163	360	31.17%

Sumber: e-LHKPN



DATA KEPATUHAN LHKPN PER 9 MARET 2020

NO	PEM PROV	WAJIB LAPOR	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	KEPATUHAN
9.	SUMATERA SELATAN	346	98	248	28.32%
10.	LAMPUNG	63	31	32	49.21%
11.	BANTEN	1.687	1.591	96	94.31%
12.	DKI JAKARTA	10.926	1706	9.220	15.61%
13.	JAWA BARAT	349	109	240	31.23%
14.	JAWA TENGAH	2.420	2.420	0	100.00%
15.	DI YOGYAKARTA	942	621	321	65.92%
16.	BALI	366	366	0	100.00%

Sumber: e-LHKPN



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



AREA INTERVENSI KORSUPGAH KPK

PROGRAM KORSUPGAH KPK

1. Perencanaan & Penganggaran APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Kapabilitas APIP

5. Manajemen ASN

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah

7. Manajemen Aset Daerah

8. Tata Kelola Dana Desa

PROGRAM REGULER

TUJUAN UTAMA:

PENYELAMATAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



PROGRAM TEMATIK

1. Peningkatan Pajak Daerah

2. Penyelamatan Aset Daerah

3. Sumberdaya Alam

4. Pendidikan

5. Kesehatan DST

FOKUS KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN

- *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi
- Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD
- Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB)

Perencanaan dan Penganggaran

- Pelimpahan 100% kewenangan
- Informasi perizinan (*online & offline*)
- Aplikasi perizinan
- Ketersediaan aturan
- Rekomendasi Teknis

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Organisasi ULP yang mandiri
- Pokja Permanen
- 100% Pengadaan Belanja Modal via ULP
- E-Katalog

Pengadaan Barang dan Jasa

- Kecukupan jumlah & kualitas APIP
- Kelembagaan APIP
- Kecukupan anggaran pengawasan
- Melaksanakan workshop APIP

Kapabilitas APIP

- Perbaikan Manajemen APIP
- ANJAB, ABK, EVAJAB
- Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai

Manajemen SDM

- Publikasi APBDes
- Implementasi SISKEUDES
- Pengawasan Dana Desa

Dana Desa

- Tersedianya database WP
- Tax Clearance
- Inovasi Peningkatan PAD

Optimalisasi Pendapatan Daerah

- Database BMD yang handal
- Pengamanan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan BMD

Manajemen BMD

- Alokasi tidak fokus pada kepentingan publik
- Hibah dan Bansos yang tidak tepat
- Intervensi pihak luar/dalam

- Penyuaan/ Pemasaran/ Gratifikasi
- Pelayanan yang kurang transparan
- Perizinan tidak transparan
- Lemahnya pengendalian

- Proses yang tidak transparan
- Mark up harga
- Pemecahan proyek
- Pelaksana tidak independen
- Spesifikasi yang berbeda

- Kurangnya jumlah dan kualitas APIP
- APIP yang tidak independen
- Anggaran pengawasan belum memadai

- Lemahnya manajemen SDM
- Penghasilan PNS belum memadai

- Penggunaan Dana Desa tidak transparan
- Penyalahgunaan Dana Desa

- Database Wajib Pajak tidak handal
- Belum ada inovasi peningkatan PAD
- Kurang tergalinya potensi PAD

- Aset tidak dikelola dengan baik
- Potensi BMD dikuasai pihak ketiga

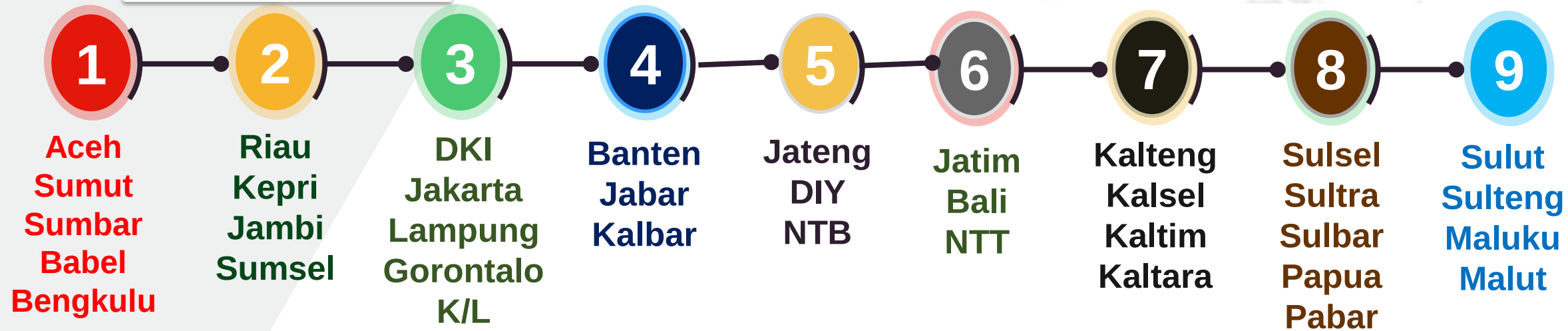
LOKUS KEGIATAN



2016
6 Provinsi

2017
24 Provinsi
380 Pemda

2018 - 2020
34 Provinsi
548 Pemda



Tahapan Program

2019

05 Monitoring dan Evaluasi



04 Pelaksanaan Renaksi



03 Rakor & Komitmen



02 Penyusunan Renaksi



2016

01 Pemetaan Masalah



[illegible]

Mengetahui,
SURYATI PERALIHAN HESTANT

Drs. H. HUSNAN M. Si



Capaian MCP 2018 dan 2019

NO	PROVINSI	TAHUN 2018	TAHUN 2019								
			TOTAL	APBD	PBJ	PTSP	APIP	ASN	OPD	BMD	DD
1.	Aceh	43%	46%	53%	45%	57%	37%	34%	46%	55%	46%
2.	Sumatera Utara	59%	63%	73%	48%	80%	50%	65%	64%	63%	51%
3.	Sumatera Barat	72%	77%	85%	66%	85%	58%	83%	82%	88%	48%
4.	Kep. Bangka Belitung	54%	62%	69%	53%	81%	51%	52%	68%	70%	37%
5.	Bengkulu	61%	68%	71%	59%	71%	50%	67%	81%	81%	57%
6.	Riau	76%	80%	89%	68%	87%	65%	83%	95%	74%	53%
7.	Kepulauan Riau	70%	73%	79%	55%	75%	55%	78%	100%	74%	43%
8.	Jambi	56%	70%	84%	62%	77%	46%	74%	82%	71%	51%
9.	Sumatera Selatan	56%	68%	68%	66%	79%	54%	62%	91%	68%	43%
10.	Lampung	72%	79%	87%	69%	82%	77%	82%	76%	80%	63%

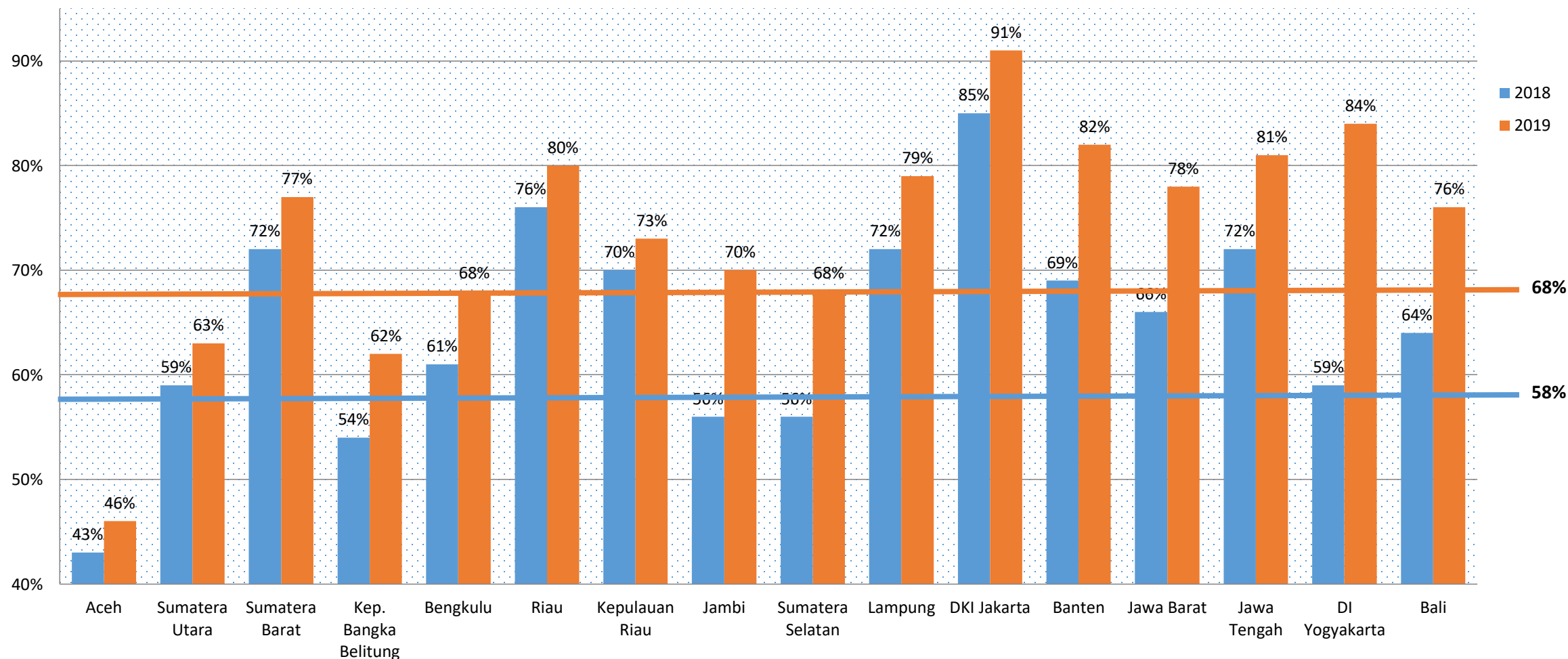
Capaian MCP 2018 dan 2019

NO	PROVINSI	TAHUN 2018	TAHUN 2019								
			TOTAL	APBD	PBJ	PTSP	APIP	ASN	OPD	BMD	DD
11.	DKI Jakarta	85%	91%	99%	86%	97%	93%	95%	97%	57%	0%
12.	Banten	69%	82%	94%	76%	88%	70%	79%	89%	81%	36%
13.	Jawa Barat	66%	78%	84%	66%	89%	67%	86%	85%	72%	45%
14.	Jawa Tengah	72%	81%	91%	74%	81%	64%	84%	93%	85%	62%
15.	DIYogyakarta	59%	84%	98%	76%	83%	62%	91%	100%	84%	42%
16.	Bali	64%	76%	86%	70%	88%	52%	83%	79%	77%	69%

Sumber: Lapkin Korsupgah Tahun 2018 & 2019

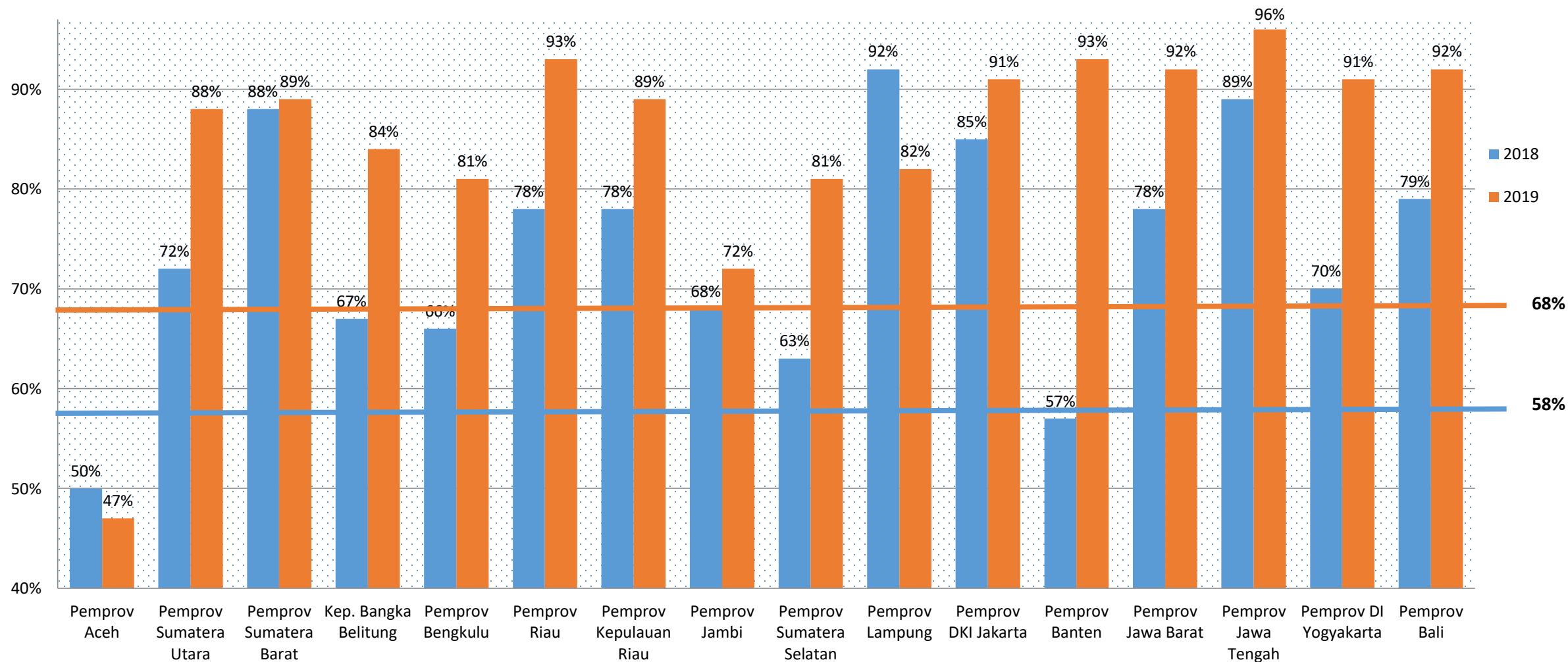
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION

PERBANDINGAN 16 PROVINSI TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019



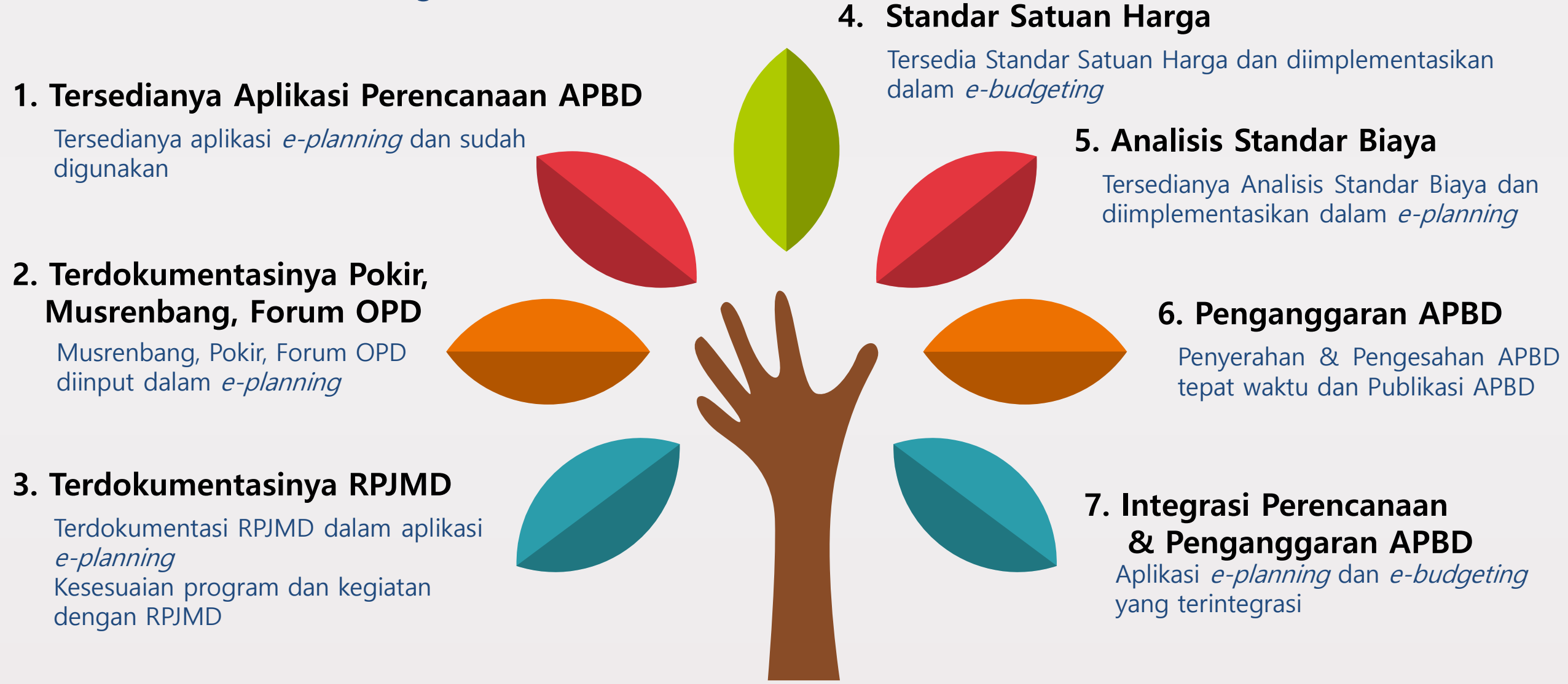
MONITORING CENTRE FOR PREVENTION

PERBANDINGAN 16 PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019



Perencanaan dan Penganggaran APBD

Indikator Keberhasilan Program Pemberantasan Korupsi
Terintegrasi



Indikator Keberhasilan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

1. UKPBJ Independen

- Pembentukan UKPBJ independen
- UKPBJ tidak hanya melaksanakan tupoksi PBJ namun juga melakukan fungsi lain (Pasal 75 Perpres 16 Th 2018)

2. Pelaksanaan Tupoksi

- UKPBJ melaksanakan reviu pemaketan dan konsolidasi pengadaan
- UKPBJ melaksanakan reviu HPS
- UKPBJ melakukan kualifikasi vendor (dokumen dan fisik)

3. Pokja Mandiri

- Pokja tidak merangkap dengan OPD lain (permanen)
- Terpenuhinya kebutuhan Jabfung

4. Perangkat Pendukung

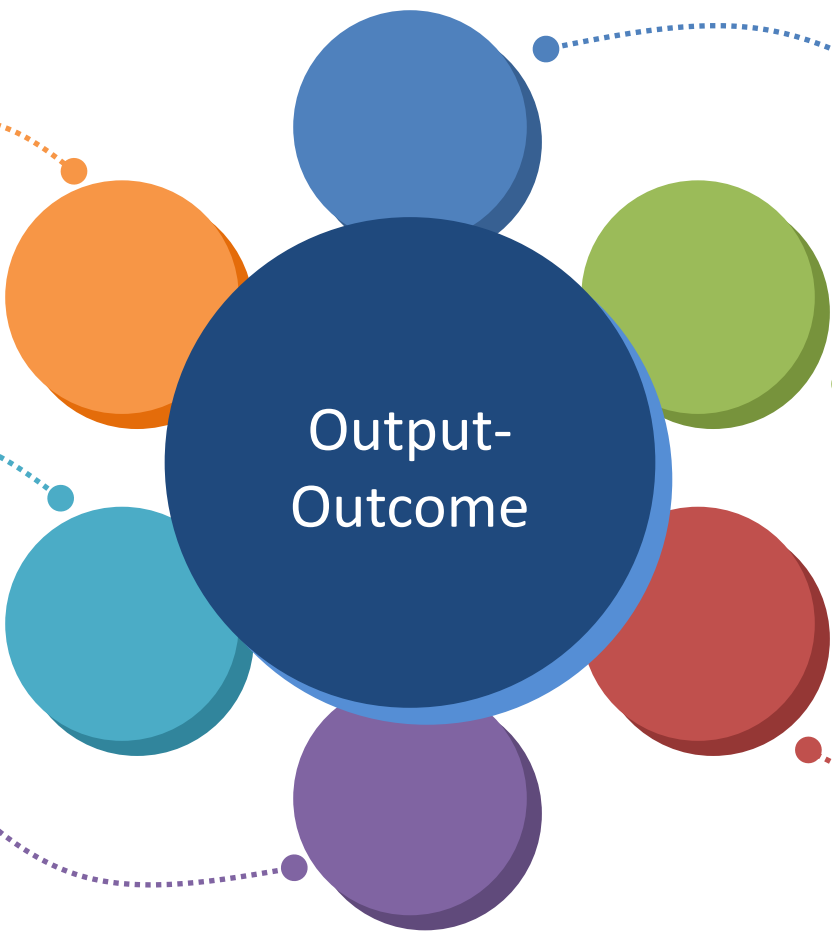
- Tersedianya SOP
- Tersedianya Kode Etik yang memenuhi Konflik Kepentingan
- Insentif Pokja UKPBJ

5. Penayangan SIRUP

Aplikasi SIRUP terintegrasi dengan aplikasi penganggaran APBD

6. Pengendalian dan Pengawasan

- Audit kepatuhan/ kinerja PBJ
- Audit IT PBJ





Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Keberhasilan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

1. Pendelegasian Kewenangan Perizinan



2. Transparansi Informasi



3. Pelaksanaan Rekomendasi Teknis



4. *Tracking System*



5. Penanganan Pengaduan



6. Ketersediaan Aturan Pendukung



7. Lokasi dan Tempat Layanan



8. Penerapan e-Signature



9. Pemenuhan Kewajiban Pemohon Perizinan



10. Sistem Perizinan Online



11. Pengendalian dan Pengawasan



Kapabilitas APIP

Indikator Keberhasilan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi



4. Probity Audit

- Terlaksananya *Probity Audit*
- 5 *Probity Audit* setiap tahun

5. Audit Investigasi

- Terlaksananya Audit Investigasi
- 5 Audit Investigasi setiap tahun

Manajemen ASN

Indikator Keberhasilan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

EVALUASI JABATAN

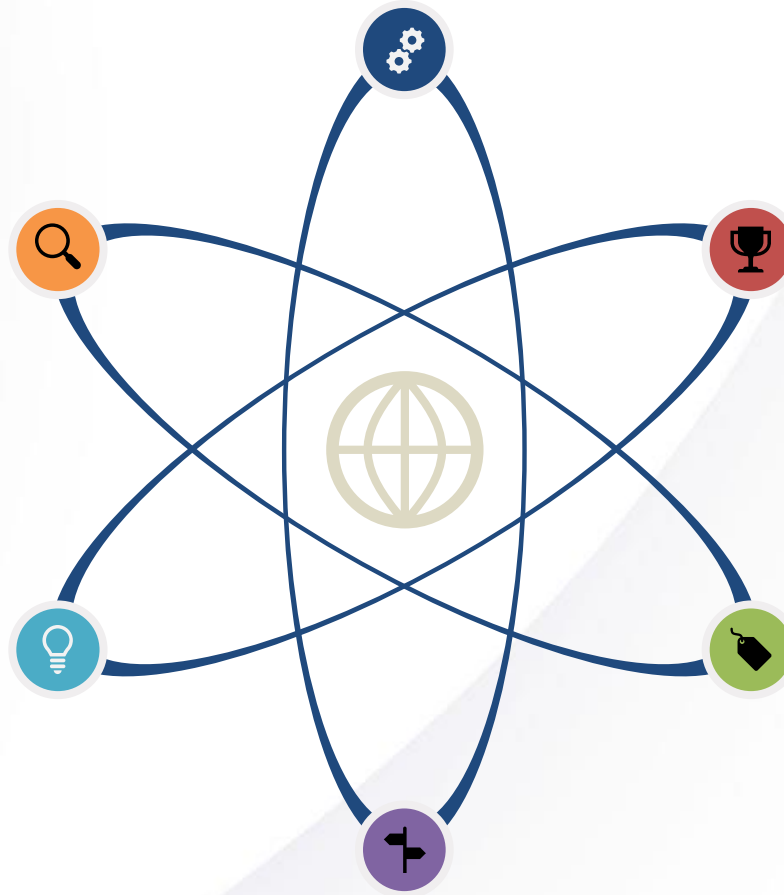
Terselesaikannya Evaluasi Jabatan

APLIKASI PENILAIAN KINERJA

Implementasi Penilaian Kinerja
Aplikasi Penilaian Kinerja terintegrasi dengan Absensi

IMPLEMENTASI TPP

Implementasi TPP
TPP mengakomodir Kepatuhan LHKPN, BMD, TPTGR



KEPATUHAN LHKPN

Regulasi Kepatuhan LHKPN
Penunjukan Admin LHKPN
Tingkat Kepatuhan LHKPN

KEPATUHAN GRATIFIKASI

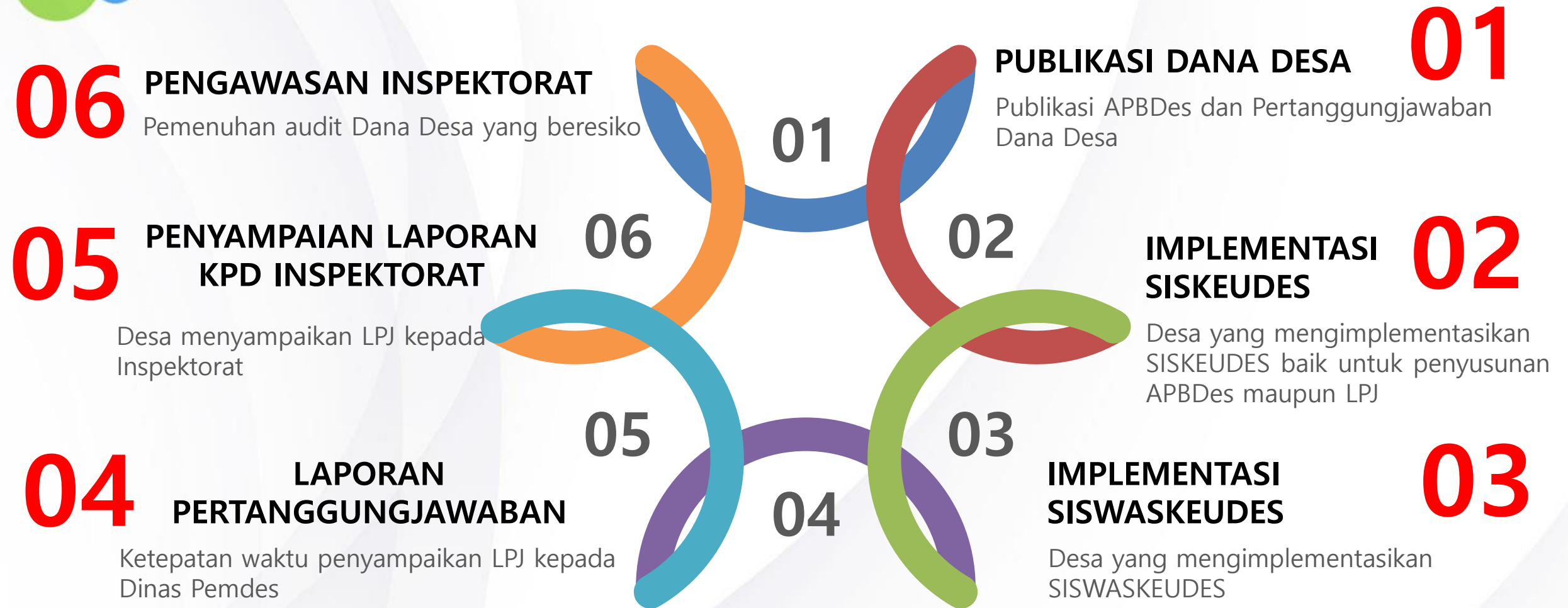
Regulasi Pengendalian Gratifikasi
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
Pelaporan Gratifikasi

POLA REKRUTMEN, PROMOSI, ROTASI, MUTASI, PEMBERHENTIAN ASN

Pelaporan rekrutmen, promosi, mutasi, pemberhentian ASN

Tata Kelola Dana Desa

Indikator Keberhasilan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi



Fokus Tematik

Utama

1

OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH (OPD)

2

BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET

3

BUMD-BPD

PP 54/ 2018 :
STRANAS PK
Aksi Optimalisasi
Penerimaan Pajak

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Latar Belakang

- Target PAD belum sesuai dengan potensi *real*
- Terjadi kebocoran dalam penerimaan PAD

Tujuan

- Meningkatkan PAD
- Kontribusi PAD terhadap APBD
- Berdampak pada kesejahteraan ASN

RUANG LINGKUP

1. Mata Pajak Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan (PAP);
- e. Pajak Rokok

2. Mata Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB);
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



TAX

PROGRAM PRIORITAS

- ☐ Koneksi sistem/*host to host: tax clearance* perizinan (KSWP), BPN: layanan BPHTB
- ☐ Sistem berbasis Teknologi Informasi (pelayanan, pembayaran, dll)
- ☐ Penyamaan data lintas pihak: SKPD, PTSP, Pertamina, PLN, BPN, dll.
- ☐ Penagihan dan pemenuhan kewajiban pajak
- ☐ *Law enforcement*





Permendagri 19 Tahun 2016

Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Manajemen Aset Daerah

Latar Belakang

- 
- Aset belum disertifikatkan
 - Tumpang tindih aset antara Pemda satu dengan Pemda/ instansi lainnya
 - Aset diklaim oleh pihak lain
 - Penyalahgunaan pemanfaatan aset

Tujuan

- 
- Legalisasi aset
 - Kejelasan status kepemilikan aset
 - Pemanfaatan aset yang bertanggungjawab
 - Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset

2

Manajemen Aset Daerah/BMD

3 Tahap Pengelolaan BMD



Legalisasi Aset 2019

01

Sertifikasi

Target 25% aset tanah
Pemda tersertifikasi Tahun
2019

02

Surat-surat kendaraan

Kelengkapan surat-surat
kendaraan

Penyelamatan Aset 2019

01

Klaim pihak lain

Aset tanah, properti yang diklaim oleh pihak yang tidak berhak kembali ke Pemda

02

Konflik kepemilikan

Menyelesaikan konflik kepemilikan secara persuasif maupun melalui jalur hukum

03

Dimanfaatkan/
diusahakan pihak lain

Pengusahaan pihak lain tetapi tidak memberikan kontribusi kepada Pemda

Bagaimana Mencegah Korupsi di Pemda

**Komitmen
Pimpinan Daerah**



Penguatan SDM



**Perbaikan Sistem
dan Tata Kelola**

